



Pemerintah Pangkas Subsidi BBM

Usulkan Jadi Rp 350 Per Liter

JAKARTA, TRIBUN - Pemerintah berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari Rp 1.000/liter menjadi Rp 350/liter dalam APBN-P 2016 yang saat ini tengah dibahas bersama DPR.

Pengurangan subsidi secara bertahap ini diyakini tidak akan berdampak signifikan pada daya beli masyarakat. Sebab, harga solar yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 5.150/liter sudah tidak perlu subsidi sampai Rp 1.000/liter akibat harga minyak dunia di level 50 dolar AS per barel.

Waka harga solar tak akan naik banyak kalau subsidi dipangkas hingga tinggal Rp 350/liter, bahkan mungkin tak perlu naik.

"Secara faktual di lapangan subsidi BBM sudah turun. Untuk APBN-P 2016, Menkeu usulkan menjadi Rp 350/liter dari Rp 1.000/liter dengan asumsi subsidi lebih tepat sasaran," kata Kepala Pusat Komunikasi



Subsidinya akan direalokasi ke program yang lebih tepat sasaran, sudah mulai dibahas di Banggar

Sujatniko
Kepala Pusat Komunikasi Publik
Kementerian ESDM

Publik Kementerian ESDM, Sujatniko, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (6/6).

Tujuan pemangkas subsidi solar ini adalah agar anggaran lebih tepat sasaran, yakni untuk program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sujatniko mengungkapkan, penghematan dari hasil

pemotongan subsidi BBM akan dialihkan untuk program lain yang lebih bermanfaat, misalnya Program Indonesia Terang (PTI) untuk melistriki daerah-daerah terpencil, Dana Ketahanan Energi (DKE) untuk pengembangan energi terbarukan, dan menghimpun cadangan BBM strategis.

"Kita kan punya PT, DKE, SPR (Strategic Petroleum Reserve). Dari solar kan sudah mulai baik supply demand-nya. Subsidiya akan direalokasi ke program yang lebih tepat sasaran, sudah mulai dibahas di Banggar (Badan Anggaran DPR)," paparnya.

Rencananya, dana subsidi solar akan dialihkan ke DKE, dan Rp 800 miliar juga untuk SPR. "Ada info awalnya Rp 800 miliar untuk DKE, Rp 800 miliar SPR. Tapi kita belum tahu persis berapa. Minggu-minggu ini Banggar akan putuskan," tutupnya.

Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah tahun 2015, terungkap bahwa ada kelebihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 3,19 triliun yang masuk ke penerimaan PT Pertamina (Persero).

BPK meminta Pertamina dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, segera menyelesaikan adanya kelebihan subsidi itu dalam waktu 60 hari. Kelebihan subsidi ini harus dikembalikan. Opsinya adalah dikompensasi untuk subsidi BBM tahun berikutnya atau uangnya dikembalikan ke kas negara.

Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan, akan menindaklanjuti temuan BPK itu agar tidak timbul keraguan negara. Sudirman berjanji segera melakukan klarifikasi terhadap adanya kelebihan subsidi BBM tahun 2015.

"Semua temuan BPK tentu kita perhatikan dan kita follow up. Nanti klarifikasi pasti diperlukan," kata Sudirman, Senin.

Penyelesaian masalah kelebihan subsidi ini, apakah akan dikompensasi untuk subsidi BBM tahun berikutnya atau dikembalikan dalam bentuk uang ke kas negara, akan didiskusikan dengan Pertamina terlebih dahulu.

Sementara itu, Pertamina mengklaim bahwa sebenarnya pihaknya masih nominal meski subsidi solar kelebihan Rp 3,19 triliun. Sebab, ada kerugian sebesar Rp 15 triliun dari penjualan premium. (dte)